

Analisis Strategi Cina melalui Teknik Penyajian Media sebagai Alat Propaganda dalam Reunifikasi Taiwan

Anggun Azahro; Taufik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia.

Email: taufik@unpas.ac.id

Submitted : July 30th, 2025

Accepted : February 13th, 2026

ABSTRAK

Sengketa reunifikasi atas Taiwan melalui dasar landasan *One China Principle* terus menjadi ambisi kuat bagi Cina. Presiden Cina, Xi Jinping, menegaskan bahwa tidak akan ada yang mampu menghalangi China dalam melakukan reunifikasi dan hal tersebut menjadi sebuah alasan kuat bagi Cina dalam meluncurkan berbagai strategi yang tidak hanya berbentuk bentuk intervensi tetapi juga melalui manipulasi propaganda dalam media. Media menjadi sebuah alat kepentingan raksasa di Cina yang menjadi mesin pengaruh bagi partai serta agen produksi propaganda relasional antara Otoritarianisme informasi serta kontrol pertumbuhan pengaruh yang terhubung pada agenda strategis. Melalui media, propaganda digunakan sebagai instrumen strategis untuk membentuk dan menyebarkan keyakinan publik mengenai reunifikasi Taiwan–Cina, propaganda juga digunakan sebagai bagian dari wacana kepentingan untuk menormalisasikan reunifikasi sebagai visi pembangunan yang harus diwujudkan dalam sudut pandang Cina. Penelitian ini berupaya menguraikan agenda media melalui teknik penyajian propaganda dalam isu reunifikasi Taiwan, hal tersebut searah dengan instrumen media yang merupakan bagian penting Cina dalam membentuk legitimasi politik dan normalisasi wacana reunifikasi. China memanfaatkan desain isu, pemilihan julukan, dan pola penyampaian tertentu sebagai teknik propaganda untuk memanipulasi persepsi publik terhadap Taiwan. Penelitian ini secara khusus bertujuan menunjukkan bagaimana media berfungsi sebagai instrumen propaganda dalam merusak legitimasi dan menyebarkan pengaruh reunifikasi di Taiwan melalui narasi, pemilihan julukan, serta isu tertentu, hingga paparan untuk hasil pengaruh propaganda secara khusus masih perlu untuk dikembangkan.

Kata Kunci : Propaganda, Media, Reunifikasi, Taiwan, Cina

ABSTRACT

The Taiwan reunification dispute, based on the One China Principle, continues to be a strong ambition for China. Chinese President Xi Jinping emphasized that no one will be able to prevent China from carrying out reunification, and this has become a strong reason for China to launch various strategies that not only take the form of intervention but also through propaganda manipulation in the media. The media has become a tool of enormous interests in China, functioning as an influence machine for the party and its agents to produce relational propaganda between information authoritarianism and control over the growth

of influence related to strategic agendas. Through the media, propaganda is used as a strategic instrument to shape and disseminate public beliefs regarding Taiwan-China reunification. Propaganda is also used as part of the discourse of interests to normalize reunification as a development vision that must be realized from a Chinese perspective. This study seeks to analyze the media agenda through propaganda presentation techniques on the issue of Taiwan reunification. This is in line with the media instrument that is an important part of China in establishing political legitimacy and normalizing the discourse of reunification. China uses design issues, choice of nicknames, and certain delivery patterns as propaganda techniques to manipulate public perceptions of Taiwan. This study specifically aims to show how the media functions as a propaganda instrument in destroying the legitimacy and spreading the influence of reunification in Taiwan through narratives, choice of epithets, and certain issues, to the point where exposure to the results of the influence of this propaganda still needs to be developed.

Keywords: Propaganda, Media, Reunification, Taiwan, China

PENDAHULUAN

Konflik bersinggungan yang terjadi antara Cina-Taiwan terus menjadi perhatian dan perbincangan global yang bergulir hingga saat ini. Dominasi isu tersebut salah satunya dipicu melalui penolakan keras Taiwan terhadap reunifikasi daratan yang diajukan oleh Cina (Ying, 2023). Isu yang terus memanas di antara Taiwan terus menghasilkan berbagai pertentangan khususnya terkait kepemilikan sah dalam status kedaulatan yang diperjuangkan oleh Taiwan yang dinilai oleh Cina tidak sah. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan tafsir dari hasil konsensus *One China principle* yang berbeda dan menghasilkan langkah yang bertentangan. Cina menganggap "One China" dalam konsensus 1992 yang telah dituangkan merupakan interpretasi bahwa hanya ada satu Cina termasuk Taiwan yang tidak dapat dicabut dari kesatuan dirinya, sementara Taiwan menganggap bahwa Cina memang tetap satu dan Taiwan bukanlah bagian *De Facto* atas Cina (Eleanor, 2016). Perbedaan sudut pandang yang terjadi antara Cina-Taiwan atas hasil konsensus 1992 kemudian menciptakan bentuk dinamika ketegangan, khususnya dalam keterlibatan Amerika Serikat di pihak Taiwan sebagai inferior politik Cina. Hal tersebut dipicu oleh kunjungan Nancy Pelosi, Juru Bicara Parlemen AS, ke Taiwan pada bulan Agustus 2022 yang menyulut kemarahan Cina (Hand, 2022). Dalam menanggapi kunjungan Pelosi, Cina kemudian membuka tensi ketegangan melalui garis operasi militer di sepanjang selat Taiwan. Cina melakukan tembakan rudal balistik di wilayah udara Taiwan, mengerahkan angkatan kapal laut yang beroperasi di garis median Selat Taiwan, hingga menerbangkan drone yang mengelilingi Pulau Kinmen sebagai respon kemarahan atas kehadiran Amerika Serikat di pulau tersebut (Keith, 2022).

Dalam mengembangkan agenda reunifikasi, Cina melakukan berbagai metode strategis dengan menyentuh akar konflik yang ingin dituju dalam sengketa yang terjadi dengan Taiwan. Metode tersebut salah satunya digunakan melalui instrumen penyajian media (Chan et al., 2022; Feng, 2021; Chung, 2023). Media negara yang berada dibawah kontrol negara kemudian diatur untuk berlomba menghasilkan propaganda strategis yang digunakan untuk mengendalikan persepsi dan manipulasi terhadap opini publik. Narasi yang digunakan dalam propaganda

tersbebut kemudian diisi dengan pengaruh yang cenderung mendukung integrasi yang dilakukan serta sesuai dengan kepentingan geopolitik dan domestik Cina (Huang, 2020; Richter, 2022). Meskipun berada dibawah komando narasi negara, media-media seperti Global Times, CGTN, CCTV hingga People's Daily cenderung memiliki cara yang berbeda dalam menyajikan narasi untuk menguatkan pengaruh Cina. Cina pada umumnya menggunakan narasi janji masa depan, reunifikasi damai, keniscayaan sejarah, hingga metode tajam yang dominan berupa tuduhan yang diarahkan pada pemimpin ataupun tindakan politik Taiwan. Cina menghubungkan tindakan yang dinilai separatis dan berlawanan Taiwan dengan metafora *playing with fire*, poster Pelosi yang sedang bermain diatas roda sirkus yang dikelilingi api, serta narasi propaganda yang berbunyi "*Tsai Ing wen harus membayar atas provokasi bodohnya*" (CGTN, 2021). Media Cina juga cenderung menyebarkan propaganda dengan merekonstruksi narasi buruk dengan tujuan melakukan deligitimasi terhadap tokoh politik seperti Tsai Ing Wen. Propaganda media kemudian juga digunakan sebagai alat untuk merusak konstruksi kepercayaan masyarakat melalui penulisan karakter tokoh politik mereka sebagai sosok yang tidak cakap dan profesional untuk memperjuangkan kemerdekaan (Huang, 2020).

Dalam menyampakan propaganda, Cina juga turut mengemas hiburan seperti budaya populer untuk menyampaikan pesan-pesan resmi, dengan menggabungkan film, acara televisi, serta konten daring untuk memperkuat pesan yang menghasilkan pengaruh (Cai, 2016; Zou, 2023). Dalam kasus Taiwan, temuan lain menjelaskan bahwa Cina, menggunakan propaganda sebagai alat sebagai alat untuk menyalurkan hasutan, persuasi, pemaksaan, hingga teror yang mengancam kelangsungan kebebasan dan kedaulatan Taiwan (Gershaneck, 2019). Konsep otoritarianisme media yang membuat informasi terpusat hanya pada satu sumber membuat perang propaganda sangat efektif dan strategis (Orinx et al. 2022) Namun beberapa penelitian tersebut hanya menyajikan pola penggunaan propaganda dan tugas media dalam menyebarkan propaganda secara umum sebagai instrumen strategis pemerintah Cina. Penelitian ini kemudian akan memberikan jembatan secara khusus, . Sehingga penelitian ini kemudian penting untuk diangkat sebagai jembatan perkembangan dari penelitian terkait penggunaan propaganda Cina melalui media yang telah ada sebelumnya.

KERANGKA ANALISIS

Propaganda merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara terorganisir yang memiliki tujuan dalam mempromosikan ide-ide tertentu, propaganda juga memiliki arti dalam konsep menyebar atau menabur (Shoelhi, 2012; Laskin, 2019; Reddi et al., 2021). Dalam perspektif dan metode komunikasi, propaganda diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi yang berusaha untuk mencapai suatu tanggapan dengan maksud yang diinginkan oleh propagandis (Brown, 2018). Dalam identifikasi lebih lanjut, propaganda memiliki arti yang sama dengan kebohongan, distorsi, manipulasi, penipuan, pengendalian pikiran, serta berita palsu (Jowett et al. 2012). Dalam penjelasan lain propaganda diuraikan sebagai pengelolaan sikap kolektif dengan manipulasi simbol-simbol penting, dan dalam hal ini sikap ditafsirkan sebagai

kecenderungan untuk bertindak menurut pola penilaian tertentu (Lasswell, 1927). Dalam kajian perkembangannya, propaganda di Cina telah berevolusi dari bentuk pesan ideologis yang bersifat kaku dan resmi menjadi jenis pesan yang berifat lebih emosional (Mattingly et al. 2020). Propaganda di Cina kemudian juga merambah ranah hiburan, media digital, hingga berita yang mudah diakses oleh audiens luar negeri (Cai, 2016; Wang, 2024; Zou, 2023). Fleksibilitas propaganda kemudian mempengaruhi integrasi ideologis yang berubah menjadi lebih halus dan dapat ditemui dalam kehidupan serta budaya masyarakat Cina (Fu, 2023)

Terdapat 6 teknik penggunaan propaganda yang dikembangkan oleh *Institute for Propaganda Analysis (IPA)* yaitu (1) Name Calling yang digunakan untuk membuat penerima pesan menerima suatu kesimpulan tanpa mempertimbangkan fakta secara lengkap ; (2) Band Wagon untuk memanfaatkan emosi dan keinginan dengan mengikuti mayoritas ; (3) Glittering Generalities , atau metode yang menggunakan kata-kata yang bersifat idealistik dan umum seperti “kebebasan,” “kebenaran,” atau “demokrasi” untuk membangkitkan emosi dan percaya tanpa menunjukkan bukti konkret ; (4) Testimonial dengan menggunakan orang terkenal atau tokoh yang dihormati untuk mendukung suatu pesan agar orang lain menerima pesan tersebut dengan lebih percaya diri ; (5) Plain Folk. mengasosiasikan pesan, produk, atau tokoh dengan kehidupan sehari-hari dan kepentingan rakyat biasa, agar tampak bahwa mereka pun memiliki kepentingan dan pendapat yang sama dengan masyarakat umum ; serta (6) Card Stacking yang merujuk pada penyajian satu sisi cerita dengan menonjolkan fakta-fakta positif dan menyembunyikan atau mengabaikan fakta-fakta negatif untuk mempengaruhi opini publik secara sepihak dan dilakukan sebaliknya untuk merugikan citra dan penyajian kisah lawan (Lee et al. 1939).

Dalam analisis dan kajian mengenai karakteristik serta sifat dasar propaganda, dapat dipahami bahwa penggunaan metode tersebut berhubungan dengan gaya penyampaian pesan yang bersifat strategis. Hal tersebut juga berhubungan dengan pola komunikasi yang digunakan pemerintah Cina melalui media negara dalam menyampaikan penyajian seputar agenda reunifikasi Taiwan. Propaganda tidak hanya hadir sebagai bentuk komunikasi persuasif, namun juga sebagai hadir sebagai instrumen linguistik yang menghubungkan pencapaian tujuan politik tertentu. Dalam strategi propaganda yang dilakukan oleh Cina, penyampaian pesan yang terjadi dalam pola penyajian setiap media Global Times, CGTN, CCTV, serta People's Daily yang berbeda dapat dilihat sebagai jenis kehadiran hubungan kepentingan dan gaya linguistik dalam sebuah instrumen propaganda yang membentuk sebuah realitas sosial dan pengaruh bagi sebuah wacana kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode kualitatif merupakan jenis pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna pengalaman, tindakan, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks sosial mereka (Creswell et al., 2007) Secara lebih spesifik penulisan penelitian ini menggunakan salah satu jenis pendekatan

kualitatif, yaitu kualitatif deksriptif. Metode deskriptif dijelaskan sebagai pendekatan yang menekankan penyelidikan pada deskripsi umum dan hal-hal naturalistik, pendekatan deskriptif juga menggunakan aspek interpretasi sebagai lensa dalam melihat suatu (Colorafi et al, 2016). Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, portal media Global Times, CGTN, CCTV, dan People's Daily, jurnal, serta publikasi lembaga Pemerintah Cina. Pendekatan dalam metode kualitatif dijelaskan sebagai pendekatan yang menggunakan teknik deskripsi dalam penelitian ini akan mampu menegemukakan sebuah pola analisis antara penggunaan media sebagai alat propaganda dalam agenda reunifikasi yang dilakukan Cina terhadap Taiwan

PEMBAHASAN

Sengketa Reunifikasi Taiwan

Pertikaian yang terjadi antara Cina-Taiwan dalam klaim atas reunifikasi serta perjuangan kemerdekaan terus menjadi hal yang bertentangan hingga saat ini. Hal tersebut diawali oleh pelarian diri ROC (*Republic Of China*) atau bagian yang telah mengisi bagian pemerintahan Cina pasca mengalami kekalahan atas perlawanan perang saudara dengan komunis pada tahun 1949 (Chang et al. 2007). Gelombang perlawanan masyarakat asli Taiwan kemudian menjadi simbol penggulingan cengkaman Kuomintang di pulau tersebut. Kelahiran Partai oposisi besar DPP kemudian menjadi simbol lahirnya perlawanan pada tahun 1986. Hadirnya perjuangan Partai DPP di Taiwan merupakan bentuk representasi harapan masyarakat lokal Taiwan atau “Bengshengren” yang menjadi korban atas pendudukan diskriminatif Kuomintang di Taiwan. Partai DPP memiliki pandangan utama bahwa Kuomintang merupakan rezim luar pulau yang telah menggantikan nasionalis dengan komunis. Pada puncaknya, DPP mengeluarkan Manifesto 1991 yang menolak supremasi Cina Daratan dan mendukung Taiwan sebagai negara yang memiliki kedaulatan utuh, Merdeka, dan menyuarakan identitas politik Nasionalis Taiwan (Shih et al. 2012).

Gelombang nasionalisme Taiwan yang digerakan oleh Partai DPP kemudian mengalami benturan ketika turunnya konsensus 1992 yang menghasilkan dasar prinsip *One China Principle*. Konsensus yang lahir dan diisi oleh negosiasi antara Partai Komunis Cina dan Kuomintang tersebut menghasilkan pemahaman yang berbeda serta tidak mengikat Cina dan Taiwan dalam sebuah wadah kesepakatan. “Satu Cina” dalam konsensus 1992 yang telah dituangkan memiliki dua sudut pandang yaitu hanya ada satu Cina termasuk Taiwan yang tidak dapat dicabut dari kesatuan dirinya, serta Taiwan yang menganggap bahwa Cina hanyalah satu dan Taiwan bukanlah bagian De Facto atas Cina (Eleanor, 2016). Hasil dari prinsip yang digunakan Cina dalam membawa Taiwan kembali dalam bagian tersebut merupakan sebuah representasi langsung yang menunjukkan bahwa Taiwan adalah bagian yang sah secara hukum dan sejarah sebagai bagian dari daratan Cina. Namun, di pihak Taiwan, *One China Principle* merupakan sebuah putusan yang dinilai bias dan tidak adil khususnya pada tindakan jejak diskriminatif yang telah dilakukan Kuomintang pada penduduk asli pulau tersebut. Landasan kemandirian yang dibawa Taiwan tersebut kemudian juga menjadi dasar pernyataan bagi Tsai Ing Wen dalam menanggapi agenda

reunifikasi Cina dengan menegaskan bahwa hasil tersebut merupakan hasil yang tidak adil atas hajat hidup 23 juta orang yang menggantungkan kehidupannya di Taiwan (Cheng, 2019).

Babak baru pertikaian yang hadir ditengah Cina-Taiwan dalam ketegangan reunifikasi kemudian dipantik oleh kemarahan Cina atas tindakan Tsai Ing Wen yang terus bertahan dengan posisi perjuangan kedaulatan dan kemerdekaan yang diharapkan (Xijin, 2021). Potensi konflik tersebut terus mencapai tensi tertinggi dengan dikeluarkannya penolakan klaim reunifikasi yang dilakukan Presiden Taiwan, dan langkahnya yang lebih memilih untuk menyambut kehadiran Amerika Serikat dalam mendukung kemerdekaan melalui kunjungan Juru Bicara Nancy Pelosi pada tahun 2022. Kunjungan yang dilakukan pertama kali sejak 25 tahun terakhir tersebut membawa misi Amerika Serikat dalam menegaskan dukungan terhadap demokrasi yang telah tumbuh baik di Taiwan serta menegaskan keinginan kemerdekaan yang diinginkan Taiwan melalui simbolisasi penerimaan dengan pemberian “medali emas” oleh Tsai Ing Wen pada Nancy Pelosi (Glasser, 2022). Cina menafsirkan langkah Tsai Ing Wen dalam menyambut kehadiran Nancy Pelosi sebagai langkah separatis terhadap daratan dan penghinaan terhadap keputusan mutlak *One China Principle* yang selama ini telah digunakan sebagai landasan Cina menahan kedaulatan dan pemisahan diri Taiwan. Dalam menanggapi kunjungan tersebut dengan nada kontradiktif, Cina kemudian mengunggah video secara luas melalui kanal *Youtube* yang menjelaskan bahwa Cina sedang berusaha meluncurkan serangan dari 68 pesawat dan menghancurkan gudang senjata Taiwan saat Pelosi melakukan kunjungan, dilengkapi dengan gambar jet dan tank yang sedang melepaskan tembakan di awal video (Zitser, 2022 ; Spengler, 2022).

Bagi Cina, *One China Principle* merupakan hasil keputusan yang mutlak tanpa pengecualian atau penolakan untuk menjalankan hasil konsensus tersebut bagi Taiwan. Sengketa yang terjadi atas upaya penyatuan kembali wilayah Taiwan tidak hanya tertahan pada dimensi sejarah yang hanya dapat dipermasalahkan melalui arsip konvensi 1992, tapi juga terus tereskalasi melalui ancaman dan invasi senyap dalam bentuk ancaman yang terus diupayakan oleh Cina dalam perkembangannya (Hand, 2022). Hal tersebut juga menjadi dasar yang berlawanan dengan Taiwan dengan membawa reunifikasi sebagai sebuah keniscayaan sejarah dan bagian dari ambisi besar dalam mengembalikan Taiwan. Hal tersebut juga ditegaskan melalui pernyataan Xi Jin Ping, bahwa reunifikasi merupakan keniscayaan dan Taiwan merupakan milik Cina sejak jaman kuno (Hung et al. 2022). Dalam sisi lain, berjalannya kepentingan agenda reunifikasi bagi Cina bukan hanya mengenai penyatuan kembali dua wilayah dalam konsep “Satu Cina” tapi juga mengenai pendekatan strategis yang dijadikan pandangan dalam pencapaian kepentingan meraih Taiwan kembali. Untuk memenuhi kebutuhan strategis tersebut, Cina memerlukan Taiwan sebagai gerbang masuk dalam kendali Asia Pasifik serta meningkatkan manuver Cina atas perairan pesisir Laut Kuning, Laut Cina Timur, Laut Cina selatan serta menekan keterlibatan Jepang dalam proyeksi rivalitas lintas selat (Chen, 2014).

Propaganda dalam Strategi Agenda Reunifikasi Taiwan

Propaganda atau dalam bahasa Cina disebut dengan *Xuanchuan* merupakan taktik pendekatan utama dalam melancarkan strategi, khususnya dalam strategi kepentingan eksternal Cina. Metode propaganda digunakan khususnya dalam mendekatkan reunifikasi sebagai agenda strategis di Taiwan sebagai alat untuk merebut hati, perasaan, dan keberpihakan secara tetap masyarakat Taiwan terhadap daratan Cina. Strategi propaganda China terhadap Taiwan umumnya dilakukan untuk melawan gelombang pembentukan identitas nasional yang dilakukan oleh dominasi Partai DPP atau desinisasi dan infiltrasi kultur daratan melalui metode yang dianggap bertentangan dan menghalangi agenda reunifikasi (Huang, 2020). Metode penghapusan budaya daratan sering digunakan melalui penghapusan kebiasaan Kuomintang dengan rekonstruksi budaya, meradikalisasi hingga menerbitkan Kurikulum Renshi (mengetahui Taiwan) yang menebarkan keragaman Etnis Taiwan tanpa unsur supremasi budaya daratan Cina (Chang et al., 2021). Cina mengikis perlawanan tersebut dengan memasukkan kembali doktrin-doktrin masa lalu Kuomintang dengan menyisipkan propaganda jejak sejarah dengan menampilkan Taiwan versi Kuomintang yang menjelaskan bahwa pulau tersebut merupakan daratan yang hilang dari yang utuh. Cina mengutamakan perusakan rasa yakin masyarakat Taiwan serta mengutamakan konsep kelompok yang harus dikembalikan kepercayaannya sebagai bagian dari daratan utama Cina melalui keyakinan penuh atas penjaminan masa depan pasca terbentuknya reunifikasi. Strategi utama ini dibentuk khususnya melalui penghancuran keyakinan identitas yang disadari sebagian besar penduduk Taiwan asli bahwa mereka bukanlah bagian dari Cina (Brady, 2012, 2015)

Dalam memperkuat konteks perebutan pengaruh dan propaganda hubungan masa lalu di Taiwan, Cina juga turut menggunakan media propaganda yang menarik perhatian dan menampilkan pesan-pesan daratan yang penuh dengan penarikan rasa percaya terhadap Taiwan. Pesan propaganda tersebut disampaikan melalui media-media tradisional seperti propaganda yang dilukis dengan cat minyak dan menggambarkan berbagai macam visualisasi. Dilansir dari halaman media *Chineseposter.net* yang memuat 5.150 jenis poster hasil propaganda Cina, beberapa diantaranya memuat poster propaganda terkait nasionalisasi Taiwan dan daratan seperti dua orang anak perempuan yang berpelukan dengan seragaman nasionalis Cina dan Taiwan yang bertuliskan “Saudara sedarah Taiwan”, serta sekelompok tentara dengan senjata tajam yang mengepung guratan pulau kecil di tengah dengan tulisan “membebaskan Taiwan” (Landsberger et al. 2007). Dengan kemajuan teknologi yang pesat, masyarakat umum menjadi semakin bergantung pada teknologi informasi. Hal ini telah membawa perubahan baru pada metode propaganda yang digunakan Cina terhadap Taiwan. Cina mulai berkontribusi pada pembentukan jenis perang opini publik melalui penggunaan propaganda yang dibantu dengan penggunaan media dalam bentuk portal berita online serta penggunaan halaman internet untuk melakukan penyebaran propaganda yang digunakan sejak tahun 2016 (Ying, 2023). Cina memuat berbagai jenis propaganda yang telah memenuhi aturan dasar atau *Tifa/Yongyu*, dan salah satunya memuat ketentuan publikasi dengan cara artidak memberikan posisi Taiwan sama dengan negara lain ketika melakukan penyiaran internasional. Cara tersebut dilakukan dengan dengan menyebut sebagai Cina Taiwan, atau menggabungkannya dengan HongKong dan Makau, seperti di wilayah ‘HongKong, Makau, dan Taiwan’ (Brady, 2015).

Corak propaganda Cina terhadap Taiwan juga memiliki beragam jenis serta memiliki muatan pesan yang berbeda dalam menyampaikan agenda reunifikasi. Cina seringkali menampilkan potret citra nasional dengan menampilkan keunggulan bahwa Cina telah bersih terlebih dahulu dalam jumlah kasus Covid serta menyatakan bahwa pemerintah Taiwan telah menutupi kasus besar atas korban-korban yang berjatuh hingga penanganan pandemi yang buruk guna melemahkan tingkat kepercayaan publik serta legitimasi pada otoritas nasional (Kendrick et al; Verma, 2020). Sementara itu, dalam membumikan kebijakan, Cina menggunakan narasi *One China Formula* yang sering disampaikan oleh Xi Jin Ping melalui konsep reunifikasi yang merupakan bentuk tindakan penyatuan yang dapat dilakukan secara damai, dan istilah separatisme yang kemudian ditambahkan dalam pidatonya tersebut untuk merujuk pada tindakan Taiwan dalam meraih kemerdekaannya atas Cina. Formula satu Cina yang diusung oleh Cina tidak hanya disampaikan secara langsung oleh Xi Jin ping, melainkan juga menyusup pada media-media lokal Taiwan yang mengusung konsep Pro-Beijing (Datt et al. 2022)

Media sebagai Alat Propaganda Reunifikasi Cina

Pergeseran strategi tekanan telah menjadi perhatian besar Cina dalam menetapkan agenda strategis untuk meletakkan Taiwan sebagai tujuan utama dalam agenda reunifikasi. Propaganda tidak hanya digunakan sebagai alat untuk memperebutkan pengaruh secara halus melalui bujukan dan kalimat tertentu yang menghubungkan kilas balik hubungan antara Cina dan Taiwan dalam reunifikasi. Namun telah digunakan sebagai alat untuk merebut pengaruh secara tajam dan lebih keras melalui alat penyebaran yang lebih efektif dan menjangkau publik Taiwan maupun internasional secara luas untuk menyebarkan kepercayaan terkait reunifikasi. Dalam Hal ini, media ditempatkan menjadi strategi utama Cina sebagai alat propaganda. Dengan bantuan teknologi dan perkembangan digital, agensi media yang mencetak pesan kepentingan negara tidak hanya menyebarkan bentuk narasi propaganda dalam bentuk koran, poster, atau narasi yang terbatas dengan bahasa mandarin, tapi juga dapat dijumpai dengan bentuk lain seperti di halaman digital yang dapat diakses secara langsung serta lembaga pemerintah yang secara resmi mengeluarkan narasi secara aktif terkait reunifikasi (Cyberspace Administration of China, 2015; Schlager et al. 2014) Hal tersebut juga selaras dengan konsep konvergensi media yang dibawah Xi Jin Ping untuk melakukan optimalisasi dalam sektor publikasi propaganda. Konvergensi media merupakan gagasan Xi sebagai langkah untuk memperluas gerakan dan sebaran propaganda yang berjalan dibawah kontrol Partai Komunis Cina melalui bentuk online seperti People's Daily Online, namun dalam perkembangannya gerai media masa tersebut turut membuka aktifitas melalui akun di media sosial dengan konsep merangkul media arus utama ke dalam perkembangan teknologi komunikasi masa (Cmp Staff, 2021).

Dalam strategi kepemimpinan Xi Jin Ping, propaganda digunakan sebagai bentuk perubahan pendekatan terhadap Taiwan atau bagian dari strategi *The Needles*. Strategi *The Needles* digunakan sebagai instrumen yang dirancang untuk menembus lawan melalui penggunaan kekuatan tajam (Walker et al., 2020). Strategi tersebut dirancang untuk “mengecoh” lawan melalui penyebaran informasi palsu, propaganda, dan narasi yang mendukung pengaruh pro-reunifikasi. Strategi tersebut beralih dari beberapa bentuk pendekatan Xi Jin Ping terhadap Taiwan dari bentuk strategi *The Carrot* yang sebelumnya lebih menekankan pendekatan berbasis kebijakan ekonomi

dan peningkatan hubungan lintas selat(Liu, 2022) . Di era pendekatan *The Needles*, propaganda dinilai tidak terlalu riskan dan berisiko karena bekerja secara strategis dengan menghancurkan legitimasi, menciptakan perpecahan, hingga mempengaruhi kebijakan tanpa adanya aksi militer(Hung et al. 2022; Lin et al. 2015; Fisher, et al 2013; Tucker, 2022). Hal tersebut sejalan dengan prinsip operasi media di Cina yang sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang bersifat sejalan dengan negara dan menutup suara yang bersifat berlawanan (Guo et al., 2023).

Tabel 2. Perubahan model pendekatan Cina terhadap Taiwan

The Carrots	The Needles
menarik dan memotivasi Taiwan melalui kebijakan ekonomi yang memberi keuntungan	Melemahkan dan mempengaruhi legitimasi Taiwan
Penyaluran insentif ekonomi, kerja sama ekonomi dan sosial, penawaran akses dan peluang ekonomi Taiwan ke arah Cina	Propaganda, infiltrasi, dan disinformasi untuk merusak legitimasi dan mempengaruhi suasana internal Taiwan
Pendekatan positif melalui usaha persuasif, serta membangun jenis hubungan jangka panjang yang menciptakan keuntungan bersama	Pendekatan agresif, provokatif, dan dilakukan untuk menciptakan instabilitas di pihak Taiwan
Pendekatan dilakukan melalui dialog atau kunjungan tokoh politik ke Taiwan	Penyebaran pengaruh dilakukan melalui portal media online dan media sosial,

Melalui media dan model komunikasi terbuka, Cina secara khusus memperkuat narasi strategisnya melalui kisah, pesan, hingga penegakkan pada tokoh dan peristiwa utama. Hal tersebut juga berjalan dibawah komando Partai Komunis Cina melalui penguatan terhadap peran kantor berita Xinhua serta CCTV dalam peran menyampaikan propaganda pada khalayak yang lebih luas, bahkan dengan mengubah penyiaran dan penulisan berita menggunakan bahasa asing dan membuat portal berita dengan alamat portal *English.news.cn* agar berita dapat diakses oleh publik di luar Cina (Tsai, 2017). Sistem Partai Komunis Cina kemudian menggunakan media sebagai alat utama untuk menyebarkan propaganda daratan dan memperkuat pengaruh tersebut di Taiwan dengan menetapkan tiga target utama yaitu masyarakat lokal Taiwan yang digunakan sebagai alat untuk menjaring dukungan dukungan reunifikasi, publik internasional yang digunakan sebagai alat untuk mengisolasi kekuatan politik pro-kemerdekaan Taiwan, serta masyarakat Cina sebagai alat untuk meyakinkan legitimasi dan dominasi pemerintahan Partai Komunis Cina (Robertson, 2020). Propaganda yang digunakan Cina sebagai bagian dari media tajam untuk menekan Taiwan dinilai berbeda dari substansi propaganda yang umumnya digunakan untuk menyebarkan pengaruh reunifikasi di pulau tersebut. Propaganda lebih banyak melibatkan unsur-unsur delegitimasi terhadap tokoh politik, manipulasi, hingga intimidasi yang diarahkan terhadap agenda reunifikasi Taiwan. Perubahan ini juga didorong oleh keinginan untuk mengurangi resistensi target terhadap pengaruh mereka. Ritcher dan walker menambahkan bahwa sifat umum yang halus dan tersembunyi yang diselipkan melalui propaganda dinilai lebih strategis

sebagai instrumen alat kontrol negara yang diatur untuk mencapai tujuannya secara langsung (Richter, 2022; Walker, 2018).

Dalam menggunakan media sebagai alat tekanan, Cina menggunakan strategi penyiaran propaganda jurang pemisah antara pemerintah Taiwan melalui rakyat sehingga dapat melemahkan legitimasinya dan menciptakan lebih banyak ruang bagi manipulasi politik (Liu, 2022). Pemecahan kepercayaan kemudian dilakukan oleh Cina melalui berbagai strategi yang bersifat menekan dan mencoba meruntuhkan Taiwan melalui distraksi keyakinan pemaksaan melalui rasa takut, hingga penanaman narasi bahwa “kemerdekaan Taiwan = Perang”. Konfrontasi militer yang telah menjadi pusat ancaman dalam eskalasi Taiwan bahkan dikemas menjadi propaganda-propaganda kecemasan atau sering dijumpai dengan bentuk “Invasi Taiwan”. Hasil survey keamanan nasional yang menunjukkan persentase warga dalam barisan pendukung kemerdekaan jika Cina segera menyerang saat Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan naik dari 26,3 persen pada 2017 (14,8 persen setuju, 11,5 persen sangat setuju) menjadi 37,8 persen pada 2020 (20,7 persen setuju, 17,8 persen sangat setuju (Hung et al.2022; Gershaneck, 2019).

Teknik Penyajian Media dan propaganda dalam isu reunifikasi Taiwan

Meskipun berada dibawah kontrol dan komando yang sama untuk menaikan propaganda sebagai alat tekanan tajam melalui media-media yang bertugas dibawah afiliasi Cina dan memiliki teknik penyajian berbeda dalam mereprsntasikan Taiwan. Perbedaan gaya tersebut mencerminkan tugas masing-masing media dalam menyampaikan agenda reunifikasi di daratan Taiwan. Beberapa media mengalirkan tekanan narasi dan jenis propaganda seperti penebaran kepercayaan terhadap reunifikasi, penampilan citra positif Cina, hingga pengaruh propaganda yang lebih tajam melalui pembingkaian tokoh tertentu melalui bingkai dan representatif pandangan Cina. Hal tersebut juga selaras dengan laporan yang menunjukan bahwa sejak tahun 2020 Cina berusaha meluncurkan jenis-jenis pengaruh tajam termasuk dalam jenis propaganda dengan tujuan memecah kesatuan opini publik di Taiwan melalui media yang berafiliasi dengan Cina untuk memperbesar narasi yang menguntungkan Cina dan melemahkan lawan politik di Taiwan terutama penyerangan terhadap pihak pro demokrasi dan kemerdekaan (Huang, 2020). Dalam bagian ini, perbedaan gaya dan model penyajian media memiliki jenis hubungan yang merujuk pada beberapa teknik propaganda tertentu melalui teks artikel online yang diterbitkan melalui halaman resmi media pemerintah Cina.

Tabel 2. Perbedaan corak penyajian media Cina

Media	Corak penyajian
Global Times	Membangun keunggulan Cina, penekanan narasi baik dengan tambahan sudut pandang pihak ketiga

CGTN	Penempatan citra pujian terhadap Cina dan penulisan citra buruk terhadap lawan politik.
CCTV	Normalisasi norma melalui penetapan perilaku baik dan buruk dalam langkah politik Taiwan.
People's Daily	Narasi emosional melalui penggambaran karakter tokoh politik

Teknik propaganda pertama yang ditemukan dalam cetakan online media resmi pemerintah Cina adalah card stacking atau metode yang digunakan untuk menenkankan pola permainan sisi negatif dan positif. Penguatan sisi positif diletakan ketika propagandis menyebarkan kebijakan di posisi dirinya sementara penguatan sisi negatif akan digunakan untuk menyajikan sisi kedudukan lawan, tanpa menyajikan sisi positif sebaliknya. Metode tersebut ditemukan seperti dalam salah satu contoh artikel Global Times yang berjudul *If cross-Straits war breaks out, sudden surrender of Tsai authorities is expected* pada 26 Oktober 2022 (Xijin, 2021). Global Times melakukan rujukan utama terhadap Wall Street Journal dan menuliskan “Sebuah laporan terbaru dari Wall Street Journal mengutip beberapa pakar yang menilai bahwa militer Taiwan memiliki “persiapan yang buruk dan moral yang rendah”. Selain itu, “pria dewasa di Taiwan sebenarnya tidak ingin bertempur” sebagai bentuk narasi yang meragukan kesiapan dan kekuatan Taiwan dalam menghadapi serangan Cina atas sengketa reunifikasi. Narasi tersebut digunakan untuk membalas penegasan Tsai Ing Wen melalui pidatonya yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Tsai Ing-wen telah menyatakan bahwa pulau tersebut akan mempertahankan diri “hingga hari terakhir” jika daratan Cina menyerang”. Selain menggunakan satu sumber untuk menyoroti kelemahan Taiwan, Global Times juga menambahkan penekanan kesan positif di pihak Cina dengan menambahkan “daratan Cina sebenarnya tidak ingin berperang. Cina memiliki kehendak untuk menjaga perdamaian dan menganggap perang sebagai pilihan terakhir”(Global Times, 2021). Global Times menambahkan penekanan tersebut sebagai rujukan tindakan positif Cina yang cenderung memilih opsi perdamaian dibanding tindakan omong kosong yang dinilai arogan dan menantang Cina secara agresif dengan kesiapan militer yang lemah.

Artikel tersebut merujuk pada gaya penggunaan card stacking dengan bukti yang menampilkan penggunaan Wall street Journal sebagai sumber utama untuk menyatakan kelemahan kekuatan Taiwan dan merujuk satu sumber tersebut sebagai acuan bahwa Taiwan memiliki persiapan kekuatan yang rendah. Dalam artikel yang diajikan, Global Times mendorong rujukan Wall street Journal sebagai sumber tunggal yang digunakan untuk memberikan validasi pada kelemahan militer Taiwan dan persiapan internal secara keseluruhan dalam menghadapi kemungkinan meledaknya perang dalam proses terjadinya reunifikasi. Dalam pemberitaan tersebut bahkan tidak ditemukan sumber lain yang menopang data yang bersifat akurat untuk mengukur kelemahan serta menunjukan sejauh mana kesiapan Taiwan dalam menghadapi kontak bersenjata dengan Cina. Global Times hanya fokus memberikan sorotan pendukung kelemahan Taiwan melalui pernyataan yang berisi bahwa persiapan yang dimiliki Taiwan saat ini dalam segi militer dan kesiapan masyarakat hanya memungkinkan pulau tersebut bertahan selama 10 jam ketika perang berlangsung.

Dalam bentuk penyajian isu reunifikasi berikutnya dalam media Cina, terdapat sebuah temuan pola name calling yang digunakan media CCTV dalam artikel yang berjudul “*CGTN launched a news feature film “Tai Bo’s Scam” to expose Tsai Ing-wen’s evil deeds of relying on beauty to sell Taiwan*”. pada 12 Agustus 2022. Name calling merupakan sebuah teknik propaganda yang digunakan untuk digunakan untuk membuat penerima pesan menerima suatu kesimpulan tanpa mempertimbangkan fakta secara lengkap. Teknik name calling pada umumnya menggunakan ejekan sebagai senjata utama dan menambahkan nilai provokasi untuk membentuk persepsi publik. CCTV dalam artikel tersebut menuliskan Tsai Ing Wen sebagai “sosok cantik yang mencari kemerdekaan dengan cara menjual Taiwan” (CCTV, 2022). Narasi dalam artikel tersebut merupakan bentuk perlawanan dan gerakan kontradiktif terhadap upaya pencarian kemerdekaan yang dilakukan oleh Taiwan dalam penerimaan kunjungan perwakilan Juru Bicara AS, Nancy Pelosi. Bentuk propaganda name calling digunakan sebagai alat untuk menggambarkan kebijakan Taiwan yang dinilai buruk, serta digunakan untuk menggambarkan personal Tsai Ing Wen yang dinilai tidak cakap. Dalam bentuk penyajian ini, Tsai Ing Wen juga dipandang sebagai sosok lancang dan menghapus bentuk pengormatan Taiwan terhadap hasil konsensus *One China Principle*.

Dalam bagian penilaian lainnya terhadap personal Tsai Ing Wen, media CGTN kemudian menuliskan narasi yang sangat menonjol dan menampilkan ejekan serta penyajian narasi dengan nada yang sarkas. CGTN dalam berita yang berjudul *Tsai Ing-wen will have to pay a price for her witless provocations* menempatkan Tsai Ing Wen sebagai sosok provokator dalam isu ketegangan selat. CGTN kemudian menuliskan “Tsai Ing-wen sendiri pada akhirnya akan ditolak oleh sejarah sebagai pencipta konflik lintas selat, perusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, serta pelanggar kepentingan rakyat Taiwan”(CGTN, 2021). CGTN juga menambahkan julukan negatif seperti perusak perdamaian dan pelanggar kepentingan rakyat Taiwan”. Julukan tersebut berkumpul dalam satu konotasi negatif yang mengarahkan bahwa tindakan Tsai Ing Wen merupakan tindakan yang buruk tidak hanya bagi Taiwan tetapi juga memantik konflik untuk terulang kembali dengan pihak Cina. Di bagian penutup, CGTN menulis sebuah penegasan bahwa Tsai Ing Wen merupakan penyebab dan sumber ketegangan lintas selat atas tindakannya yang menciptakan kebingungan publik saat ini dengan menyematkan julukan “pencipta konflik lintas selat”. CGTN menggunakan teknik name calling dalam menyematkan narasi negatif dalam bentuk mendiskreditkan kehadiran dan tindakan Tsai Ing Wen, jenis-jenis julukan yang disematkan tersebut digunakan untuk menempatkan Tsai Wen sebagai sosok provokator di tengah ketegangan yang terus terjadi antara Cina-Taiwan. Di sisi lain, penggunaan julukan tersebut juga memudahkan publik untuk menerima secara lebih mendalam bahwa Tsai Ing Wen merupakan sosok pemimpin yang tidak cakap dan keputusannya dalam memperjuangkan reunifikasi yang menantang hasil konvensi 1992 merupakan resiko besar bagi masa depan Taiwan.

Dalam bagian penekanan cita-cita reunifikasi, CGTN menerbitkan sebuah berita pada 9 Oktober 2021, dengan judul utama *China’s complete reunification ‘will be and can be realized*. Dalam artikel tersebut terdapat pola penggunaan glittering generalities atau metode yang menggunakan kata-kata yang bersifat idealistik dan umum seperti “kebebasan,” “kebenaran,” atau “demokrasi” untuk membangkitkan emosi dan percaya tanpa menunjukkan bukti konkret.

CGTN juga mengutip langsung pidato Xi Jin Ping yang berbunyi “peremajaan nasional telah menjadi inti dari keniscayaan sejarah” yang menunjukkan kekuatan Cina dalam memajukan strategi reunifikasi (CGTN, 2021). CGTN menambahkan bahwa pidato Xi telah mengalami penurunan tensi dan berbeda seperti apa yang disampaikan sebelumnya yang cenderung akan menghancurkan Taiwan, dan menuliskan bahwa Xi lebih mengarah pada pendekatan Reunifikasi Damai untuk pidatonya kali ini. Berbeda dengan nilai-nilai yang cenderung menyerang bahkan bertentangan dengan konsep invasi yang terus disajikan Cina jika Taiwan melakukan perlawanan terhadap langkah reunifikasi, CGTN dalam artikel tersebut cenderung menyajikan bagaimana peran dan kedekatan Cina dalam usaha reunifikasi damai.

Artikel tersebut menjadi lebih menarik ketika CGTN berusaha menampilkan kiasan indah terkait perilaku Cina yang cenderung damai dengan menuliskan bahwa “Secara internasional, ia tidak pernah memprovokasi perang melawan atau menantang kepentingan inti negara mana pun” serta penambahan “Di dalam negeri, Cina daratan ternyata sangat penting dalam stabilitas dan pertumbuhan Taiwan”. CGTN kemudian menambahkan jasa kebesaran Cina terhadap pembangunan Taiwan melalui “Daratan adalah pasar ekspor terbesar Taiwan dan sumber surplus perdagangan terbesar, menurut Kantor Urusan Dewan Negara Taiwan (CGTN, 2021). Contoh tersebut mengarah pada penggunaan bentuk pola glittering Generalities untuk membangkitkan emosi kepercayaan baik serta kebaikan, khususnya pada penekanan Cina yang ang tidak pernah memprovokasi perang dan sebaliknya bertentangan dengan serangkaian aksi Cina yang cenderung sering melakukan provokasi baik berbentuk aksi militer maupun secara verbal dengan menegaskan slogan reunifikasi = perang.

People’s Daily sebagai bagian media lain milik Partai Komunis Cina menerbitkan berita dengan pola yang hampir sama dengan CGTN dalam menggambarkan sosok Tsai Ing Wen. People’s Daily menerbitkan sebuah berita pada 7 Agustus 2022, lima Hari pasca kunjungan yang dilakukan Nancy Pelosi berjudul *Xinhua Commentary: Pelosi’s evil intentions behind toxic Taiwan stunt*. Dalam isi berita tersebut, People’s Daily menggunakan teknik name calling sebagai poin utama dalam mencantumkan kebencian terhadap tindakan kunjungan Juru Bicara AS, Nancy Pelosi, di Pulau Taiwan. People’s Daily menggunakan name calling dalam menyebutkan segala jenis hal yang berkaitan dengan Pelosi melalui penyebutan nama-nama buruk seperti di bagian pembuka dengan menulis menuliskan bahwa hal tersebut telah mempertaruhkan perdamaian di Selat Taiwan, bagian berikutnya kemudian melengkapi panggilan yang disematkan dan menambahkan “Politisi Washington: sekelompok egois, oportunis, dan munafik, yang memprioritaskan perhitungan politik mereka sendiri di atas segalanya” (People’s Daily, 2022). Artikel tersebut merupakan bagian khusus yang digunakan Cina untuk menyebut kehadiran AS dalam sengketa reunifikasi Taiwan melalui representasi terhadap sosok Nancy Pelosi. Selaras dengan motif penyajian representasi yang digunakan oleh CCTV terhadap sosok Tsai Ing Wen, pola name calling digunakan secara personal dalam mengupas sosok Pelosi melalui satu kaca mata negatif dalam ejekan dan penggunaan istilah tertentu.

Narasi People's Daily yang sangat identik dalam memberikan corak representasi terhadap penggunaan model name Calling terletak pada bagian paling tajam dan spesifik dalam mendeskripsikan Pelosi. People's Daily tidak hentinya memanggil Pelosi dengan julukan "sang egois, oportunistik, dan munafik" (people's Daily, 2022). People's Daily sangat sering menambahkan panggilan tersebut dalam mengungkapkan narasi hitam terhadap Pelosi. Dalam memberikan tekanan negatif terhadap AS, People's Daily mengungkap kejahatan rasisme atas George Floyd dan kematian 1 juta orang akibat Covid-19 di Amerika Serikat sebagai hal yang tidak terbantahkan keberadaannya. Di bagian akhir, People's Daily kemudian menambahkan narasi yang berbunyi "sebenarnya orang Taiwan tidak menyukai keberadaannya di pulau tersebut, dan Pelosi hanyalah menjalankan sebuah bisnis dalam kunjungannya". Bentuk ejekan dan narasi tersebut dalam penyajian media People's Daily tersebut digunakan sebagai model penyerangan terhadap Pelosi yang memantik kontradiksi dan kemarahan Cina sebagai pihak yang menahan segala bentuk kemerdekaan yang diusahakan oleh Taiwan. Hal tersebut juga dijelaskan melalui penutup artikel People's Daily tersebut yang menyebutkan bahwa "63 persen netizen Taiwan jelas tidak menyambutnya di pulau itu." People's Daily kemudian mengulang penekanan dengan menambahkan julukan negatif yang berisi "Meskipun Washington tidak kekurangan politisi seperti itu, dia jauh lebih menonjol sebagai seorang egois, oportunis, dan munafik pada saat yang bersamaan". Dalam artikel berita tersebut, People's Daily menggambarkan AS sebagai pihak yang terlalu dominan dan campur tangan dalam urusan kemerdekaan Taiwan. People's Daily juga turut mengupas bagaimana urusan domestik dan kebebasan di AS tidak seindah seperti janji politik dan tindakan perlindungan yang mereka tunjukkan terhadap Taiwan.

Pembingkaiian dan model name calling terhadap Pelosi juga digunakan dan menjadi tren gelombang penolakan masyarakat Cina di Sina Weibo. Salah satu media resmi pemerintah Cina yang memantik ledakan opini publik tersebut adalah akun sina weibo khusus penerbitan milik Komite Pusat Liga Komunis muda Cina. Akun media sosial komite pusat liga komunis muda Cina mengunggah sebuah karikatur dengan gambar Nancy Pelosi, sebagai delegasi yang dikirim AS terhadap Taiwan pada Agustus 2022 dengan memegang bola api diatas roda berputar dengan riasan badut dan misil di sudut gambar. Unggahan tersebut meramaikan linimasa Weibo dan gejolak media sosial Cina pasca Pelosi mendarat di Taiwan pada dua Agustus 2021. Gambar yang diunggah pasca pendaratan Pelosi di Taiwan tersebut dilengkapi dengan #Bermaiapiakanmembakar diri dan dilengkapi dengan tulisan pada unggahan yang berisi "Pemerintah Cina dan rakyat Cina memiliki posisi yang konsisten dalam masalah Taiwan (Tucker, 2022). Unggahan Liga Komunis Muda Cina dalam media sosial Weibo dapat dilihat sebagai bagian dari kemarahan Cina atas Pelosi dan AS yang dinilai tidak menghormati konsensus 1992 sebagai kesepakatan Cina atas Taiwan. Unggahan karikatur tersebut juga diikuti dengan slogan penolakan di media sosial Weibo yaitu "1,4 miliar warga tidak setuju" yang menyerukan amarah warga Cina terhadap tindakan Amerika Serikat (Feng, 2022).

Dampak Propaganda Reunifikasi di Taiwan

Dalam membaca dampak pengaruh propaganda secara strategis, diperlukan beberapa aspek atau peristiwa penting yang menjadi standar dimana dampak dan keberadaan propaganda dapat terlihat lebih jelas (Doob, 1950). Pada tahun 2022, kunjungan Nancy Pelosi sebagai delegasi politik AS menjadi peristiwa penting, khususnya dalam urusan kemerdekaan Taiwan dan respon terhadap ambisi reunifikasi Cina (Hsiao et al., 2023; Matt Spengler, 2022). Taiwan menggali beberapa dampak dan perkembangan reunifikasi, salah satunya melalui lembaga pusat penelitian National Chengchi University yang menguraikan aspirasi politik masyarakat Taiwan terhadap keyakinan reunifikasi dengan Cina di masa depan (Election Study Center, 2022). Dalam hasil yang ditemukan melalui survey terkait prespesi Publik Taiwan dalam reunifikasi, keinginan masyarakat Taiwan di tahun 2022 dalam mempercayai reunifikasi dengan Cina hanya sebesar 1,2 persen. Dalam arah bertahan dengan status quo dan menuju reunifikasi, tidak terdapat sebuah peningkatan dan tetap di garis berwarna ungu sebesar 6,0 persen, sementara kepercayaan terhadap kemerdekaan Taiwan mengalami peningkatan sebesar 25,4 persen (Election Study Center, 2022).

Dalam bagian lain, 80 persen responden tidak menyetujui klaim Partai Komunis Cina yang berisi “Taiwan adalah Taiwan dari Cina, menyelesaikan masalah Taiwan adalah masalah orang Cina, masalah yang harus diselesaikan oleh orang China,” (Hsiao, 2022). Dampak ancaman dan berbagai tekanan propaganda yang diluncurkan oleh China di sepanjang 2022 khususnya dalam kunjungan yang dilakukan Pelosi juga direspon datar oleh Tsai Ing Wen sebagai salah satu target utama propaganda dalam kepentingan reunifikasi Taiwan (Feng, 2021). Tsai Ing Wen mengungkapkan bahwa Taiwan menentang bentuk apapun terkait reunifikasi serta menambahkan bahwa rakyat Taiwan sudah merasa terbiasa secara psikologis dalam menghadapi berbagai agresi dalam bentuk tekanan ekonomi, intimidasi militer, maupun serangan propaganda (Independent, 2022). Tingkat resistensi tinggi masyarakat Taiwan terhadap jenis propaganda daratan yang dilakukan Cina kemudian selaras dengan berbagai bentuk kebijakan yang diluncurkan pemerintahan Tsai Ing Wen dalam melindungi legitimasi kemerdekaan di pulau tersebut. Tsai Ing Wen dalam misi pembersihan propaganda asing telah membangun sebuah pendekatan bahwa propaganda hanyalah sebuah virus, hingga setiap masyarakat dapat menangkap virus tersebut dengan mendeteksi sumber kebenaran (Huang, 2020). Tingkat kesadaran masyarakat Taiwan kemudian semakin terbentuk dengan hadirnya pembatasan terhadap operasi media luar negeri dan menetapkan regulasi ketat terkait izin pendirian media yang memiliki kedekatan dan karakteristik sebagai agen pengaruh reunifikasi daratan (Kerimu, 2025).

Dalam dampak yang dihasilkan melalui penggunaan propaganda reunifikasi di Taiwan, strategi dominan yang dicondongkan oleh Cina terlihat membentur keyakinan publik Taiwan dalam keinginan kemerdekaan. Strategi reunifikasi yang diluncurkan melalui propaganda yang merebut keyakinan masyarakat Taiwan tidak memiliki dampak signifikan yang dihasilkan khususnya dalam tahun kunjungan Pelosi. Sumber lain menyebutkan bahwa, legitimasi Cina di mata rakyat Taiwan cenderung dilangkahi oleh persepsi masyarakat Taiwan yang lebih yakin bahwa invasi atau perang akan datang jika Taiwan melangkah pada kemerdekaan (Hung et al. 2022; Shen 2020). Hal tersebut merupakan bentuk perhatian atas peningkatan resistensi terhadap kekuatan tajam Cina melalui propaganda. Taiwan terus memberikan perhatian bahwa tindakan Cina dalam

mengalirkan propaganda merupakan bentuk tindakan yang tidak sesuai atas komitmen Taiwan sebagai negara yang merdeka berdaulat (Hung et al.2022; Gershaneck, 2019). Di sisi lain, dampak tekanan Cina terhadap Taiwan dalam reunifikasi tidak dapat dikatakan sepenuhnya meleset dari strategi yang diletakan. Persepsi datangnya invasi yang diyakini terjadi oleh masyarakat Taiwan menjadi sebuah pandangan berarti bahwa kemerdekaan Taiwan masih berada dalam zona abu-abu dan bayangan reunifikasi Cina.

SIMPULAN

Propaganda dalam penggunaannya menjadi sebuah hal strategis diikuti dengan sistem penguasaan media yang terorganisir oleh partai. Gagasan otoritarianisme dalam pengendalian media kemudian mendorong keunggulan Cina dalam menciptakan pertanian propaganda dalam mencapai kepentingan. Penelitian ini kemudian juga menunjukkan sebuah konsep dimana peran media menempati posisi sentral dalam menjalankan agenda reunifikasi. Melalui penggunaan bahasa asing, Cina menggunakan penggunaan gaya bahasa dan kalimat yang berbeda dalam melakukan eksploitasi terhadap berbagai jenis komponen yang berbeda dimulai dari ejekan tokoh politik, penyerangan kebijakan, hingga nilai keunggulan nasional untuk melakukan demoralisasi terhadap kemerdekaan Taiwan. Melalui penggunaan metode propaganda dalam teknik penyajian media yang digunakan oleh Beberapa media partai seperti Global Times, CCTV,CGTN, Global Times, Hingga People's Daily, Cina berusaha mengemas pengaruh terkait Reunifikasi secara Damai maupun melalui Ancaman tersirat melalui pesan terurai yang dibuat dengan metode menyusup pada pemahaman publik secara umum dalam berita menyampaikan secara langsung bahwa Taiwan harus kembali bersama Daratan. Namun di sisi lain, tingkat Ketajaman propaganda Cina melalui Media masih perlu ditinjau melalui aspek kesiapan dalam menembus lapisan Masyarakat Taiwan serta pertahanan ilmu Pengetahuan yang digunakan sebagai sistem pertahanan propaganda. Narasi Efektif serta terhadap keadaan Masyarakat Taiwan akan selalui menjadi hal ideal untuk Taktik propaganda Cina dalam bentuk apapun, seperti menjanjikan harapan dan perlindungan sebagai wilayah yang terjamin Pasca Reunifikasi akan menjadi sebuah ujung tombak propaganda dalam jenis apapun pengaruh yang Cina Tuai, karena kemerdekaan yang Masyarakat Taiwan inginkan berlandaskan pada kehidupan masyarakat yang Makmur serta bagian yang tidak terjajah dalam bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- A, L., & Lee. (1939). *The Fine Art of Propaganda: a study of Father Coughlin's speeches*.
- Brady, A.-M. (2012). "We Are All Part of the Same Family": China's Ethnic Propaganda. *Journal of Current Chinese Affairs*, 41(4). <https://doi.org/10.1177/186810261204100406>

- Brady, A.-M. (2015a). China's Foreign Propaganda Machine. *Journal of Democracy*, 26(4), 51–59. <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0056>
- Brady, A.-M. (2015b). China's Foreign Propaganda Machine. *Journal of Democracy*, 26(4), 51–59. <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0056>
- Cai, S. (2016). *State Propaganda in China's Entertainment Industry*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315637082>
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- CCTV. (2022). *CGTN launched a news feature film “Tai Bo’s Scam” to expose Tsai Ing-wen’s evil deeds of relying on beauty to sell Taiwan”*.
- CGTN. (2021, October 18). Tsai Ing-wen will have to pay a price for her witless provocations. *CGTN News*.
- Chan Kendrick, & Thornton Mariah. (2022, September 19). China's Changing Disinformation and Propaganda Targeting Taiwan. *The Diplomat*.
- Chang, H.-C., & Holt, R. (2007). Symbols in Conflict: *Taiwan* (Taiwan) and *Zhongguo* (China) in Taiwan's Identity Politics. *Nationalism and Ethnic Politics*, 13(1), 129–165. <https://doi.org/10.1080/13537110601155841>
- Chen, D. P. (2014). Constructing Peaceful Development: The Changing Interpretations of “One China” and Beijing's Taiwan Strait Policy. *Asian Security*, 10(1), 22–46. <https://doi.org/10.1080/14799855.2013.874337>
- Cheng, E. (2019). Foreign involvement in Taiwan independence is ‘intolerable,’ China's Xi says. *CNBC*.
- Cmp Staff. (2021). *Media Convergence*.
- Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). Qualitative Descriptive Methods in Health Science Research. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 9(4), 16–25. <https://doi.org/10.1177/1937586715614171>
- Cyberspace Administration of China. (2015, August 7). *One year since media convergence: Four approaches for mainstream media to deepening convergence (in Chinese)*. [Http://Www.Cac.Gov.Cn/2015-08/17/C_1115858555.Htm](http://Www.Cac.Gov.Cn/2015-08/17/C_1115858555.Htm).
- Eleanor Albert. (2016). China-Taiwan Relations. *Council on Foreign Relations*, 1, 1–6.
- Huang, A. (2020). *PA P E R J U L Y 2 0 2 0 Combatting and Defeating Chinese Propaganda and Disinformation A Case Study of Taiwan's 2020 Elections*. www.belfercenter.org
- Hung, T.-C., & Hung, T.-W. (2022). How China's Cognitive Warfare Works: A Frontline Perspective of Taiwan's Anti-Disinformation Wars. *Journal of Global Security Studies*, 7(4). <https://doi.org/10.1093/jogss/ogac016>

- Hsiao, R., Dotson, J., Jung, E., Shattuck, T., & Weaver-Lee, Z. (2023). Taiwan and South Korea Enhancing Their Engagement as Chinese Aggression Intensifies Taiwan Announces an Increased Defense Budget for 2024 The “Chip 4 Alliance” and Taiwan-South Korea Relations One Year Later: How Has China’s Military Pressure on Taiwan Changed Since Nancy Pelosi’s Visit? (Vol. 8). <http://globaltaiwan.org/sub->
- Independent. (2022). Taiwan’s Tsai says no backing down to Chinese aggression. Independent.
- Joshua Zitser. (2022). Taiwan scrambles its fighter jets as Chinese war planes conduct simulated attack, officials say. <https://News.Yahoo.Com/Taiwan-Scrambles-Fighter-Jets-Chinese-142051658.Html>.
- John Feng. (2021, June 10). Prepare for War,’ China Military Warns in New Propaganda Poster for Taiwan. Newsweek
- Keith.J.Hand. (2022). *Waging External Struggle Through Law : China"s Evolving Legal Strategies*.
- Kerimu, A. (2025). *Expulsion of PRC Media Outlet Reveals Scale of Taiwan’s Information Challenge*.
- Kerry K. Gershaneck. (2019). Media Warfare: How Taiwan Can Win the Battle for the Cognitive Domain. *Prospect & Exploration*, 1, 66–101.
- Kimberly Orinx, & Tanguy Struye de Swielande. (2022). China and Cognitive Warfare: Why Is the West Losing? *Hal Open Science*, 8, 1–6.
- Kuhn, R. (1997). The Media and Politics. In *Developments in West European Politics* (pp. 263–280). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25341-8_15
- Lin, F., Chang, T.-K., & Zhang, X. (2015). After the spillover effect: news flows and power relations in Chinese mainstream media. *Asian Journal of Communication*, 25(3), 235–254. <https://doi.org/10.1080/01292986.2014.955859>
- Liu, R. C. (2022). From ‘Sticks’ to ‘Carrots’ and ‘Nets’, then to ‘Needles’: The Evolution of the CPC’s Policy towards Taiwan. *China Report*, 58(1), 90–105. <https://doi.org/10.1177/00094455221074255>
- Landsberger, S., & Haijden, M. (2007). Chinese posters.net. Chinese posters.Net.
- Laskin, A. V. (2019). Defining propaganda: A psychoanalytic perspective. In *Communication and the Public* (Vol. 4, Issue 4, pp. 305–314). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/2057047319896488>
- Lawrence Chung. (2023, January 11). Music and mockery – the latest missiles in the Taiwan Strait propaganda war. South China Morning Post.
- Leonard W.Doob. (1950). Goebbels Principles Of Propaganda. *Public Opinion Quarterly*, 14(3).
- Matt Spengler. (2022). *Video Makes Unsubstantiated Claim About Chinese Maneuvers After Pelosi Visit to Taiwan*.
- Mattingly, D., & Yao, E. (2020). How Propaganda Manipulates Emotion to Fuel Nationalism: Experimental Evidence from China. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3514716>

- Mohamad Shoelhi, M. B. A. , M. M. (2012). *Propaganda Dalam Komunikasi Internasional* (Nurbaya Nunik Siti, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Simbiosis Rekatama Media.
- Natascha E. Fisher, & Karen E. Fisher. (2013). A social diffusion model of misinformation and disinformation for understanding human information behaviour. *Information Research*, 18(1), 15–35.
- Patrick Tucker. (2022). Chinese Disinformation Group Targeted Pelosi's Taiwan Visit. <https://www.Defenseone.com/Technology/2022/08/Chinese-Disinformation-Group-Targeted-Pelosis-Taiwan-Visit/375377/>.
- Puma Shen. (2020). How China Initiates Information Operations Against Taiwan (12).
- Reddi, M., Kuo, R., & Kreiss, D. (2021). Identity propaganda: Racial narratives and disinformation. *New Media & Society*, 146144482110292. <https://doi.org/10.1177/14614448211029293>
- Richter, A. (2022). A Theoretical Framework and Constructed Model for Sharp Power. *Open Journal of Political Science*, 12(04), 652–669. <https://doi.org/10.4236/ojps.2022.124035>
- Robertson, L. (2020). *CHINESE MESSAGING ACROSS THE STRAIT. China-friendly Narratives and the 2020 Taiwan Presidential Election*.
- Schl ager, J., & Jiang, M. (2014). Official microblogging and social management by local governments in China. *China Information*, 28(2), 189–213. <https://doi.org/10.1177/0920203X14533901>
- Shih, L. F., & Scott, Mc. J. (2012). TAIWAN IN COMPARATIVE PRESPECTIVE : Special issue : Taiwan and Ireland in Comparative Perspective. *LSE*, 4.
- Tsai, W.-H. (2017). Enabling China's Voice to Be Heard by the World: Ideas and Operations of the Chinese Communist Party's External Propaganda System. *Problems of Post-Communism*, 64(3–4), 203–213. <https://doi.org/10.1080/10758216.2016.1236667>
- Verma, R. (2020). China's diplomacy and changing the COVID-19 narrative. *International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis*, 75(2), 248–258. <https://doi.org/10.1177/0020702020930054>
- Walker, C. (2018). What is “sharp power”? *Journal of Democracy*, 29(3), 9–23. <https://doi.org/10.1353/jod.2018.0041>
- Wang, C. Y. (2024). The Ideology is Blowing in the Wind: Managing Orthodoxy and Popularity in China's Propaganda. *Political Communication*, 41(3), 435–460. <https://doi.org/10.1080/10584609.2023.2290492>
- Xijin, H. (2021). If cross-Straits war breaks out, sudden surrender of Tsai authorities is expected. *Global Times*.
- Ying, Y. L. (2023). China's Cognitive Warfare Against Taiwan and Taiwan's Countermeasures. *Taiwan Strategist*, 38–39.

Zou, S. (2023). Restyling propaganda: popularized party press and the making of soft propaganda in China. *Information, Communication & Society*, 26(1), 201–217.
<https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1942954>